

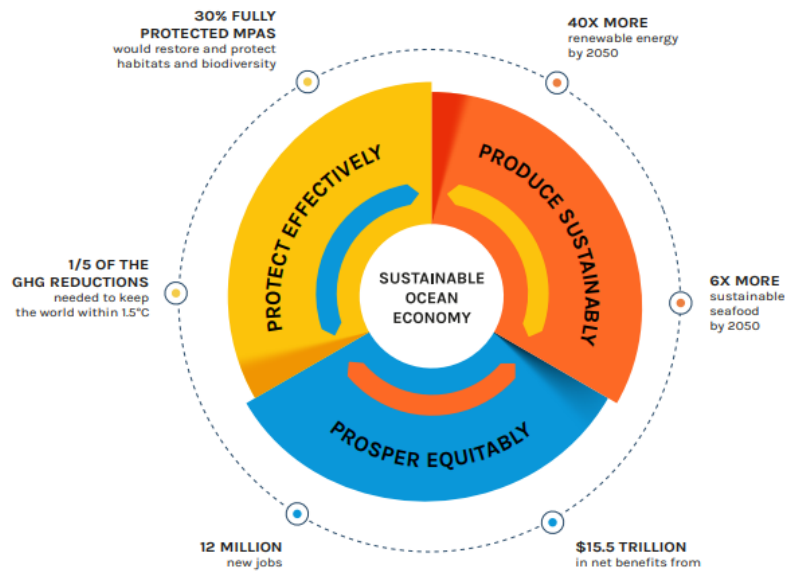


PRESS RELEASE

Transformasi Menuju Pembangunan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan

Pada hari Selasa, 22 Desember 2020 Indonesia Ocean Justice Initiative yang didukung oleh Kompas menyelenggarakan seminar daring bertajuk “Transformasi Menuju Pembangunan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan”. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti peluncuran dokumen “*Transformations for a Sustainable Ocean Economy: A Vision for Protection, Production and Prosperity*” dari *High-Level Panel on Sustainable Ocean Economy*. Dokumen ini diluncurkan oleh 14 pemimpin negara pada 3 Desember 2020.

Sustainable ocean economy adalah konsep pembangunan sektor kelautan yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem, pemenuhan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dan pembangunan ekonomi. Dengan begitu, nilai ekonomi laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*). Prof. Dr. Mari Elka Pangestu (Co-chair of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy Expert Group and Managing Director of World Bank) menyampaikan bahwa implementasi *sustainable ocean economy* akan mendatangkan “*triple win*” untuk manusia (*people*), lingkungan hidup (*nature*), dan ekonomi (*economy*).

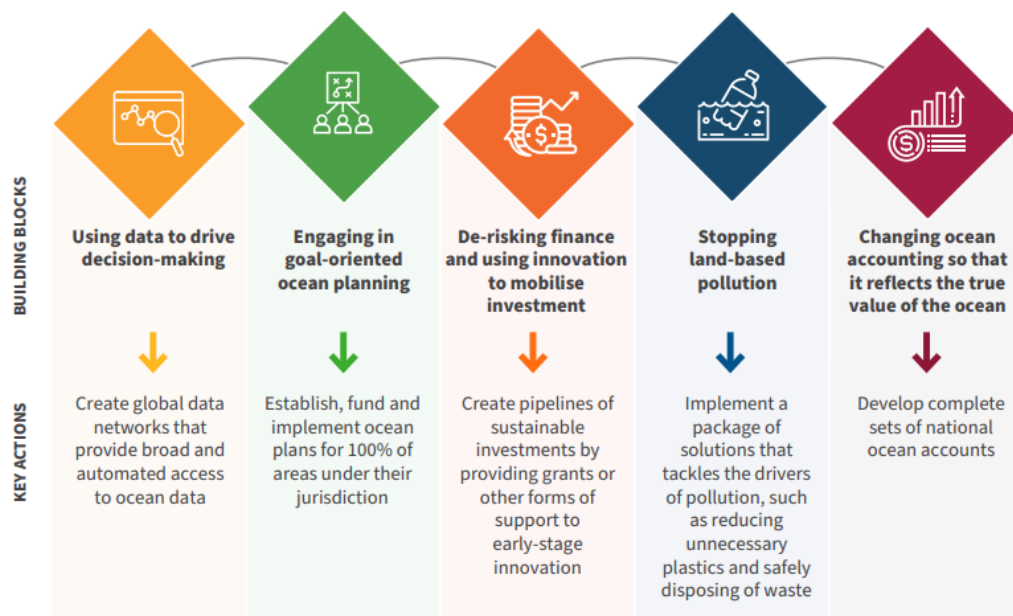


Sumber: Martin R. Stuchtey, et al., *Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy*, (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, 2020).

Kuncinya, negara harus melakukan perlindungan ekosistem yang efektif (*protect effectively*), produksi/pemanfaatan ekonomi kelautan secara berkelanjutan (*produce sustainably*), dan penyejahteraan atau pendistribusian manfaat untuk rakyat secara merata (*prosper equitably*).

Terdapat (lima) fondasi yang penting untuk membangun *sustainable ocean economy* berdasarkan dokumen *Transformations for a Sustainable Ocean Economy*, yaitu

- Penggunaan data dalam pengambilan keputusan;
- Pembuatan rencana kelautan dan pelaksanaannya sesuai tujuan;
- Minimalisasi risiko keuangan (*de-risking finance*) dan inovasi untuk mengatur investasi;
- Penghentian pencemaran yang berasal dari darat; dan
- Pengembangan model penghitungan kekayaan laut yang mampu mencerminkan nilai ekonomi laut yang sesungguhnya.



Sumber: Martin R. Stuchtey, *et.al.*, *Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy*, (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, 2020).

Prof. Mari juga menjelaskan bahwa manfaat yang akan didapat dari implementasi *sustainable ocean economy* nilainya secara ekonomi jauh lebih besar daripada biaya (*cost*) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya. Mengutip laporan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* yang berjudul "*Ocean Solutions that Benefit*

People, Nature and the Economy”, perbandingan nilai keuntungan manfaat ekonomi : biaya/investasi (*benefit:cost*) serta taksiran nilai ekonomi manfaatnya dari kegiatan *sustainable ocean economy* adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Perbandingan <i>Benefit:Cost</i>	Taksiran Nilai Ekonomi yang Didapatkan
Konservasi dan Restorasi <i>Mangrove</i>	3:1	\$0.2 triliun
Dekarbonisasi dari <i>International Shipping</i>	4:1	\$5.1 triliun
Produksi Makanan dengan Bahan Baku yang Berasal dari Laut	10:1	\$6.7 triliun
Produksi Energi Angin dari Turbin Lepas Pantai	12:1	\$3.5 triliun

Negara-negara maritim perlu berinvestasi lebih besar di pengembangan dan implementasi *sustainable ocean economy*. Menurut Prof. Dr. Zuzy Anna, M.Si (Direktur Eksekutif *SDGs Center* Universitas Padjajaran), semua negara maritim hendaknya berinvestasi setidaknya 10% dari hasil ekonomi laut mereka setiap tahun untuk pengelolaan dan tata kelola (dengan ini dihasilkan sekitar \$300 miliar setiap tahun dalam rangka mendukung tercapainya target-target *sustainable ocean economy* pada tahun 2030). Negara-negara maritim dapat menerapkan rasio pajak terhadap PDB rata-rata global sebesar 26% (OECD, 2019) untuk kegiatan laut, mereka akan menghasilkan \$780 miliar setahun yang dapat diterapkan untuk mengelola laut secara lebih efektif. Namun demikian, saat ini sektor kelautan mengalami *underinvestment*, hanya 1% dari total nilai ekonomi (yaitu sebesar 13 miliar USD) yang diinvestasikan

untuk proyek *sustainable ocean economy*, padahal pendanaan yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari itu untuk mencapai target-target *sustainable ocean economy* 2030.

Untuk mewujudkan *sustainable ocean economy* di Indonesia, terdapat beberapa program prioritas yang perlu diakselerasi menurut Dr. Nani Hendiarti, M.Sc. (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Program-program tersebut adalah:

- a. Perbaiki tata kelola perikanan tangkap dan modernisasi praktek budidaya;
- b. Optimalisasi potensi pariwisata bahari melalui pengembangan destinasi pariwisata baru;
- c. Pengembangan ekosistem *mangrove* merupakan ekosistem yang tidak hanya sangat penting untuk penyangga kehidupan tetapi juga memiliki nilai ekonomi dalam kaitannya dengan *carbon pricing*, sehingga perlu dijaga, dilestarikan dan direstorasi;
- d. Penanganan sampah dengan pendekatan teknologi, sampah tidak hanya dapat dikurangi dan dikendalikan tetapi pada saat yang sama dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar;
- e. Menjalankan target Bauran Energi Terbarukan yang ditetapkan Indonesia. *One Map Policy* dapat digunakan untuk mengamankan semua potensi ekonomi maritim dengan sumber energi terbarukan;
- f. Mengembangkan 4 (empat) pelabuhan laut dalam, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan; dan
- g. Membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk mendukung pengetahuan, pengalaman, teknologi dan pendanaan.

Selain hal-hal di atas, Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam paparannya menekankan pentingnya perencanaan ruang laut yang partisipatif, serasi, dan terkendali pemanfaatan ruangnya secara koordinatif dan efektif untuk kesejahteraan, termasuk pentingnya keterlibatan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional dalam mewujudkan *sustainable ocean economy*. Selain penekanan pada inklusivitas, Prof. Sjarief juga menjelaskan pentingnya melakukan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan untuk menjamin kelestarian serta pemanfaatan secara berkelanjutan. Prof. Sjarief juga menyampaikan bahwa pemerintah dalam

melakukan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu memperhatikan aspek kelestarian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem.

Upaya Indonesia untuk mewujudkan *sustainable ocean economy* membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, diplomasi secara global menjadi penting. Dr. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.Si (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri) dan Agustaviano Sofjan (Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup) menyampaikan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan forum-forum internasional strategis untuk meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan *sustainable ocean economy*, antara lain:

- a. Forum G-20, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah di tahun 2022;
- b. ECOSOC, dimana Indonesia menjadi anggota pada 2021-2023;
- c. *Archipelagic and Island States Forum*, yang diprakarsai oleh Indonesia;
- d. *UN Ocean Conference* dan *Our Ocean Conference*; dan
- e. Momentum *UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development* yang ditetapkan oleh PBB salaam 2021-2030.

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (CEO *Indonesia Ocean Justice Initiative*) menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat kesesuaian antara kebijakan kelautan nasional yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip *sustainable ocean economy*, namun masih ada *gap* antara tekstual dengan realita pelaksanaannya. Maka dari itu, perlu konkritisasi dan keberadaan agenda aksi dari paradigma *sustainable ocean economy* untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Diharapkan Presiden Joko Widodo dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk tim yang terdiri dari pakar independen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun status kekayaan laut (*ocean wealth*), kesehatan laut (*ocean health*), dan *assessment* terhadap pendistribusian manfaat laut secara berkeadilan (*ocean equity*);
- b. Peran dan fungsi Bappenas sebagai simpul perencanaan pembangunan nasional di dalam pencapaian SDGs 14 dan transformasi *sustainable ocean economy* perlu lebih diperkuat dengan menerapkan pola kerja yang lebih inklusif;

- c. Melakukan reviu kebijakan kelautan Indonesia dan efektivitas pelaksanaannya yang dimuat dalam RPJP, RPJMN, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
- d. Menyusun *sustainable ocean plan* Indonesia sampai dengan 2030 secara inklusif
- e. Mengintegrasikan *sustainable ocean plan* ke dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional dan daerah; dan
- f. Mensyaratkan perbaikan praktik demokrasi (termasuk penguatan masyarakat sipil), *governance* (termasuk perbaikan kualitas birokrasi dan pemberantasan korupsi), dan *rule of law* (termasuk penegakan hukum yang adil dan berintegritas).

Jakarta, 23 Desember 2020
Indonesia Ocean Justice Initiative

Narahubung:
Mas Achmad Santosa (CEO) - masachmad.santosa@oceanjusticeinitiative.org
Stephanie Juwana (Director) - stephaniej@oceanjusticeinitiative.org